



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia Nya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sarjoko

NIP. 196703191998031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini melaporkan tingkat pencapaian strategis dan indikator kinerja utama tahun 2024 yang dikaitkan dengan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki 15 Indikator Kinerja yang diperjanjikan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Indikator Kinerja Utama						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,35	13,51	101,20%	Tercapai
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,48	11,49	100,09%	Tercapai
Sasaran Khusus						
3	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%	Tercapai
4	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah.	Persen	100	100	100%	Tercapai
5	Nilai kualitas data SDI.	Nilai	3,25	100	100%	Tercapai
6	Persentase pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.	Persen	100	94,89	94,89%	Tidak Tercapai
7	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	117,72	147,15%	Tercapai
8	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100%	Tercapai
9	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%	Tercapai
10	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%	Tercapai
11	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	89,96	126,70%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Sasaran Operasional						
12	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
13	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,99	99,99	Tidak Tercapai
14	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,5	84,32	95,28%	Tidak Tercapai
15	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	Tercapai

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) terdiri dari 2 indikator kinerja utama, 9 indikator sasaran khusus, dan 4 indikator sasaran operasional. Dari 15 indikator terdapat 12 (dua belas) indikator tercapai dan 3 (tiga) indikator tidak tercapai. Adapun 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai terdapat pada 1 (satu) pada indikator sasaran khusus dan 2 (dua) pada indikator sasaran operasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	i1
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan.....	4
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	7
F. Landasan Hukum	8
G. Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.....	9
H. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja	17
B. Perjanjian Kinerja	177
BAB III.....	31
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja	31
1. Capaian Kinerja Organisasi	31
2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja	34
B. Capaian Strategis Kinerja	47
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	47
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir	48

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	50
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	52
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	53
C. Realisasi Anggaran.....	54
1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.....	54
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program.....	55
3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja.....	55
 BAB IV.....	 57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
C. Rencana Tindak Lanjut	58
 Lampiran	 60
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	60
2. Prestasi Dinas Pendidikan Tahun 2024	70

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2024	10
2. Tabel 1.2. Hasil Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan DKI Jakarta	12
3. Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026.....	16
4. Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	17
5. Tabel 2.3. Indikator Program Pendukung IKU	18
6. Tabel 2.4. Indikator Kegiatan	19
7. Tabel 2.5. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
8. Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2024	31
9. Tabel 3.2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024.....	34
10. Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	34
11. Tabel 3.4. Realisasi Capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah.....	41
12. Tabel 3.5. Indikator Program Kerja Dalam Renstra Dinas Pendidikan	47
13. Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	49
14. Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja	50
15. Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Dengan Nasional	53
16. Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Dengan Nasional	53
17. Tabel 3.10. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja	55
18. Tabel 3.11. Realisasi Penyerapan Anggaran Di Dinas Pendidikan Berdasarkan Program Tahun 2024	56
19. Tabel 3.12. Realisasi Penyerapan Anggaran Di Dinas Pendidikan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024.....	56

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tujuan

Tujuan utama pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima;
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan;
4. Terwujudnya ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik berkarakter mulia, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan;
5. Menjadikan setiap pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan secara rutin bagi setiap pendidik dan para tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan di Jakarta;
6. Memperkuat peran dan tanggungjawab P4 sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan profesional bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Jakarta, sehingga mereka mampu

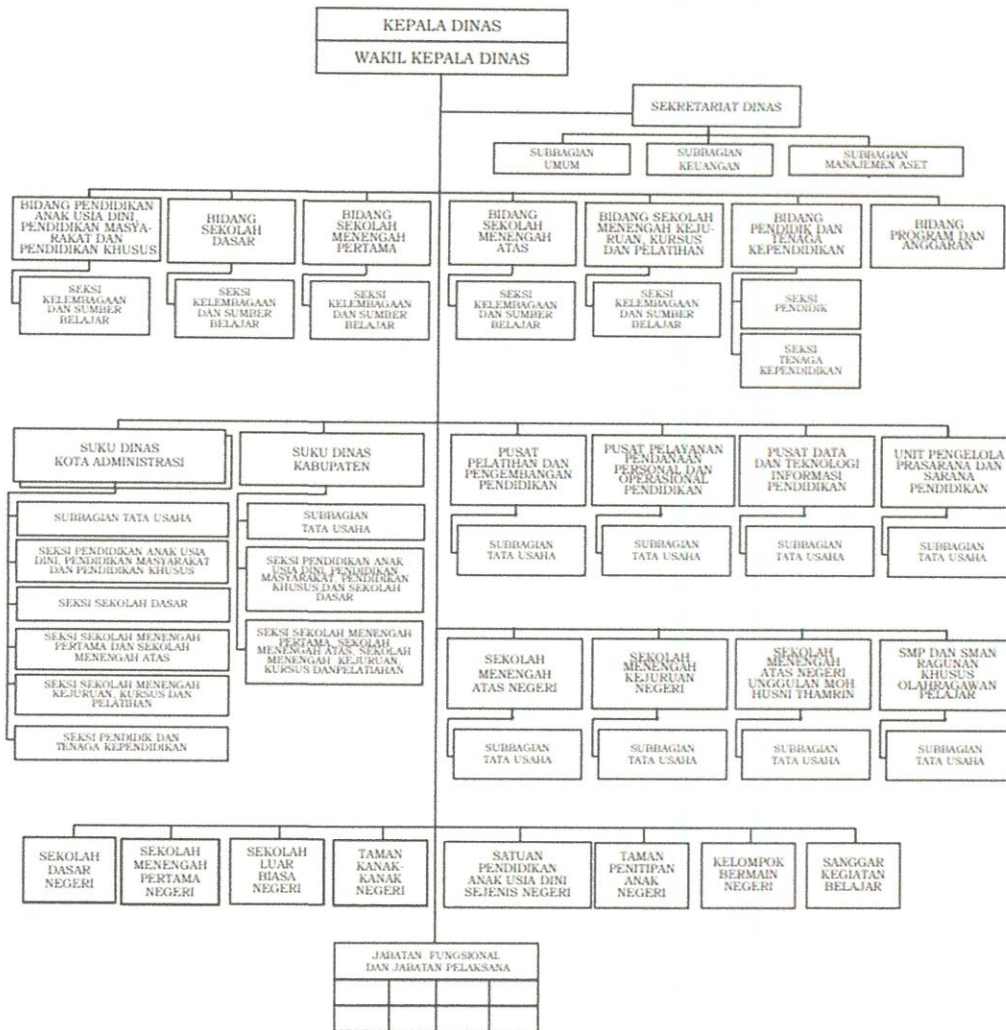
- menjadi *the real educator, motivator dan inspirator* yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan peserta didik yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di satuan pendidikan;
7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan;
 8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
 9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah;
 10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di pulau seribu;
 11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
 12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional;
 13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar satuan pendidikan;
 14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
 15. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai wadah kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
 16. Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja dan berdedikasi tinggi;
 17. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel;
 18. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
 19. Berjalanya sistem *e-catalogue* yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas pendidikan DKI Jakarta;
 20. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
 21. Terwujudnya pola kepemimpinan satuan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif;
 22. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik;

23. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuh suburkan *life skill*, *work skill* dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan peserta didik.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Manajemen Aset,
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;

- e. Bidang Sekolah Dasar, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- f. Bidang Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- g. Bidang Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- h. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- i. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendidik;
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan,
- j. Bidang Program dan Anggaran;
- k. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;
 - 3) Seksi Sekolah Dasar;
 - 4) Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - 5) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan;
 - 6) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- l. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan,
- m. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4), yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- n. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- o. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- p. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- q. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas:
 - 1) Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
 - 3) Taman Penitipan Anak;
 - 4) Kelompok Bermain;
- r. Sekolah Dasar;
- s. Sekolah Menengah Pertama;
- t. Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

- u. Sekolah Menengah Kejuruan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- v. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Moh. Husni Thamrin, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- w. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- x. Sekolah Luar Biasa;
- y. Sanggar Kegiatan Belajar.

Selain itu, Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pendidikan Kota;
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.

2. Kedudukan Perangkat Daerah

- a. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas; dan
- g. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

3. Tugas Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas :

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

“Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.”,

b. Fungsi

Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
- 4) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 7) Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 8) Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
- 9) Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;
- 11) Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- 12) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- 14) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;
- 15) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- 16) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

D. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pegawai, baik yang merupakan jabatan struktural dan fungsional (guru) sebagai berikut :

TABEL 1.1. DATA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Jabatan	Data		Satuan
		Januari 2024	Desember 2024	
1	Tenaga Kependidikan :			
a.	Pejabat Eselon	247	240	Orang
b.	Ketua Sub Kelompok	8	13	Orang
c.	Pejabat Pelaksana :			
	▪ Tenaga Kependidikan PNS	352	315	Orang
d.	Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan :			
	▪ Tenaga Kependidikan PNS	965	852	Orang
	▪ Tenaga Kependidikan Non ASN (KKI)	9,135	9,205	
2	Jabatan Fungsional :			
a.	Jabatan Fungsional Guru :			
	▪ Guru PNS	20,691	18,763	Orang
	▪ Guru PPPK	15,620	16,363	
	▪ Guru Non ASN (KKI)	4,079	6,520	
b.	Jabatan Fungsional Non Guru :			
	▪ Pengawas Sekolah	137	100	Orang
	▪ Penilik	54	44	
	▪ Pamong Belajar	26	23	
	▪ Arsiparis	4	12	
	Total	51,318	52,450	Orang

Berdasarkan data di atas, kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum masih belum tercukupi dikarenakan jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas lebih banyak dari pada jumlah penerimaan pegawai di tahun 2024.

E. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Dinas Pendidikan telah merumuskan 4 poin besar yang menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya DKI Jakarta pada tahun 2024 statusnya tidak lagi sebagai ibukota Negara, transformasi yang dilakukan adalah DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Oleh karena itu Dinas Pendidikan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mewujudkan ide tersebut. Adapun keempat isu strategis yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan: masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang, PAUD, menengah dan khusus

2. Masih rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada asesmen nasional
3. Belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik dikategorikan sebagai Pendidik dan Tendik Profesional
4. Masih rendahnya penyerapan lulusan SMK baik di DU/DI, berwirausaha, dan yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya kondisi pendidikan di DKI Jakarta sudah cukup baik namun di beberapa jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Pada jenjang pendidikan PAUD di DKI Jakarta masih cukup rendah, padahal pendidikan PAUD memiliki peranan yang penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif pada perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik pada masa mendatang. Untuk itu Dinas Pendidikan memberikan perhatian khusus pada angka partisipasi jenjang PAUD, karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses ke PAUD.

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMA/SMK dan MA angka partisipasi sekolah (APS) pada tahun 2023 masih cukup rendah yaitu 72,50 (sumber: BPS-RI). Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena banyak anak lulusan SMP/MTs yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK, dan MA. Pemerintah sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun sehingga memiliki konsekuensi untuk menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menyediakan pelayanan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK dan MA. Pendidikan SMK juga mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta akan berubah menjadi pusat ekonomi global. Oleh karena itu lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja DU/DI. Sehingga lulusan SMK banyak yang terserap di DU/DI sepenuhnya.

Pada jenjang pendidikan khusus masih terdapat anak-anak disabilitas yang tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk sekolah-sekolah negeri masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus dan pelatihan guru inklusi. Selain jumlah SLB negeri juga masih belum memenuhi untuk menampung anak-anak disabilitas sehingga pembukaan sekolah baru atau ruang kelas baru menjadi isu yang prioritas bagi dinas pendidikan.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. Pendidik dan tenaga pendidik harus bisa membaca perubahan zaman yang terjadi sehingga dalam proses pembelajaran dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi bidang ilmu, kompetensi

kognitif, kompetensi intrapersonal, dan kompetensi interpersonal. Selain itu tantangan bagi Pendidik saat ini dunia tengah berada pada kondisi yang diistilahkan sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Compexity, and Ambiguity*). Kondisi ini adalah di mana dunia bisnis dan sosial penuh perubahan yang sangat cepat, tidak stabil serta tidak terduga, ketidakpastian informasi karena banyaknya informasi di berbagai platform baik media sosial ataupun media konvensional, dan kompleksitasnya permasalahan karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Untuk itu penting bagi pendidik untuk dapat membaca situasi saat ini agar peserta didik yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dunia saat ini.

Berangkat dari sejumlah kajian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga nasional maupun internasional, indeks literasi numerasi peserta didik kita masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Peringkat literasi yang masih rendah juga berimbas kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Ditilik dari skor IPM, Indonesia juga masih menempati level yang tidak menggembirakan terlebih jika dibandingkan dengan peringkat sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berangkat dari data dan fakta yang ada, penguatan kecakapan literasi dasar merupakan keniscayaan dan menjadi sesuatu yang tak dapat ditawar.

F. Landasan Hukum

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

G. Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasi Inspektorat sebagai berikut :

TABEL 1.2. HASIL EVALUASI SAKIP DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa : a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. e. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. e. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
4.	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		100%	85,00		

H. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Target Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan capaian kinerja tahun 2018-2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dasar hukum, dan sistematika penyajian laporan kinerja.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan pengukuran kinerja 2024 berupa target capaian kinerja organisasi, realisasi capaian kinerja organisasi, perbandingan realisasi capaian dengan tahun sebelumnya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbandingan dengan target nasional, serta realisasi anggaran program yang mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan realisasi anggaran berdasarkan unit kerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan saran dari pimpinan perangkat daerah serta menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Visi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua

Misi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, terdapat 4 tujuan dan 17 sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang terkait Dinas Pendidikan sebagai berikut:

TABEL 2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023-2026

Tujuan : Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan Sasaran: Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat.										
Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir
		T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Dimensi Pendidikan	12,12	12,14	12,39	12,16	12,5	12,18	-	12,20	-	12,20

Keterangan : T (Target), C (Capaian)

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yang akan digunakan dimana definisi operasional dari indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Dinas Pendidikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sudah melampaui target Renstra tahun 2026.

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengampu Misi 1 yaitu:

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

Mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tuntas, menyeluruh, cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis serta berkarakter. Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat bekerja di mancanegara.

Visi yang disebutkan diatas adalah cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi komitmen dan tantangan bagi segenap Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
3. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

B. RENCANA KINERJA

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Capaian
Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,35	13,51
	Terjaminnya Akses dan Layanan Serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	11,49

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kinerja, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator sasaran. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih fokus.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian Kinerja organisasi. Berikut ini program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. INDIKATOR PROGRAM PENDUKUNG IKU

Program	Indikator Program	Tahun 2024		Persentase (%)
		Target	Capaian	
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	100	79,95	79,95
	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100	95,13	95,13
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,58	93,36	101,94
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	74,98	74,98
	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	98,81	98,81
	Persentase guru profesional	88,5	91,47	103,36
	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	72,56	72,58	100,02
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	69,92	85,89	122,84
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	62,5	78,19	125,10
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	100	53,69	53,69
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100

Dari Indikator Program Pendukung IKU terdapat 5 Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu :

1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)

2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
3. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
4. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
5. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)

Dari kelima indikator program di atas, terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya validitas data, masih adanya anak tidak sekolah (ATS) yang disebabkan karena anak yang tereksplotasi secara ekonomi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menikah di usia dini, disabilitas/gangguan mental pada anak, bullying, ketiadaan pengasuhan orang tua, bekerja karena kebutuhan ekonomi.

Selain indikator program pendukung IKU, juga terdapat kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. INDIKATOR KEGIATAN

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2024		Persentase
		Target	Capaian	
Program Pengelolaan Pendidikan				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	80,25	93,01	115,90
	Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	83	96,06	115,73
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	66,38	88,34	133,08
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat	100	100	100
	Indeks Iklim Keamanan SMA	89,5	80,08	89,47
	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100	100	100
	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	88	93,66	106,43
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	53	75,83	143,08
	Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	71,81	72,09	100,39
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	58,32	59,36	101,78
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	78	86,22	110,54
	Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja	28,09	57,22	203,70
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK	100	100	100
	Indeks Iklim Keamanan SMK	89,68	77,89	86,85
	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	99,51	100	100,49
	Indeks Iklim Inklusivitas SMK	86,42	89,36	103,40
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	73	86,2	118,08
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	64,93	88	135,53
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB	68,41	85,32	124,72

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2024		Persentase
		Target	Capaian	
	berdasarkan Asesmen Nasional			
	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82	86,35	139,68
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	53,98	77,98	144,46
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	62,88	81,06	128,91
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	56,98	84,56	148,40
	Indeks Iklim Keamanan SDLB	87,02	89,01	102,29
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	88,11	79,94	90,73
	Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,83	91,32	108,93
	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	90,41	90,76	100,39
	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	80,27	81,06	100,98
	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	85,22	87,75	102,97
	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	79,96	74,82	93,57
	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	91,56	76,99	84,09
	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	89,75	78,20	87,13
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	95	97,04	102,15
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	65,46	71,33	108,97
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	47,08	52,82	112,19
	Persentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat	100	100	100
	Indeks Iklim Keamanan SD	94,02	94,77	100,80
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	97,38	99,34	102,01
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	83,93	84,59	100,79
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	72	98,14	136,31
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	77,52	88,76	114,50
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62,59	84,15	134,45
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat	100	100	100
	Indeks Iklim Keamanan SMP	91,52	91,93	100,45
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	96,13	99,60	103,61
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	84,25	86,92	103,17
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD	74,34	85,57	115,11
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	66,05	66,85	101,21
	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	79,38	86	108,34
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan	53,24	59,26	111,31
Progran Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2024		Persentase
		Target	Capaian	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	4	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100

Dari Indikator Kegiatan Pendukung IKU terdapat 6 Indikator Kegiatan yang tidak tercapai, yaitu :

No.	Indikator Kegiatan	Faktor Penghambat
1.	Indeks Iklim Keamanan SMA	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat beragam pemahaman dan layanan dalam pengambilan tindakan penanganan perundungan, hukuman fisik, dan kekerasan seksual di satuan pendidikan Penentuan peserta survey lingkungan belajar untuk peserta didik ditentukan melalui sampling data pada dapodik
2.	Indeks Iklim Keamanan SMK	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pendampingan kepada peserta didik terhadap bahaya NAPZA. Faktor terbesar yang menyebabkan anak usia remaja sangat rentan untuk terpapar rokok atau zat adiktif lainnya adalah rasa 'keingintahuan' serta faktor lingkungan yang dapat ditiru dari perilaku orang tua atau orang dewasa di rumah maupun lingkungan sekitar. Persepsi yang berbeda dalam menjawab pertanyaan pada Asesmen Nasional.
3.	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Terdapat beberapa indikator penilaian iklim inklusivitas yang kurang tepat diterapkan pada SLB. Contohnya indikator mengenai keterlibatan seluruh peserta didik pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada

		SLB pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan tingkatan ketunaan. Indikator tersebut menyebabkan miskonsepsi dan rendahnya indeks iklim inklusivitas di SLB. Hal ini bukan merupakan diskriminasi dan eksklusivitas.
4.	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	Terdapat beberapa indikator penilaian iklim inklusivitas yang kurang tepat diterapkan pada SLB. Contohnya indikator mengenai keterlibatan seluruh peserta didik pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada SLB pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan tingkatan ketunaan. Indikator tersebut menyebabkan miskonsepsi dan rendahnya indeks iklim inklusivitas di SLB. Hal ini bukan merupakan diskriminasi dan eksklusivitas.
5.	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	
6.	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	

C. PERJANJIAN KINERJA

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (Perkin) tertuang didalam dokumen indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, yang didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target.

Penetapan Indikator Perkin dipresentasikan dan tertuang didalam dokumen Indikator Perkin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, dimana di dalamnya memuat indikator kinerja serta terdapat sasaran strategis maupun indikator kinerja termasuk target capaian untuk masing-masing indikator kinerja. Berikut ini program kegiatan yang tertuang di dalam Indikator Perkin Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

TABEL 2.5. INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
				I	II	III	IV		
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Sigma dari rasio jumlah penduduk berusia ≥ 7 tahun yang bersekolah pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ≥ 7 tahun pada tahun tersebut HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	N/A	N/A	N/A	13,35	13,35	Tahun
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	N/A	N/A	N/A	11,48	11,48	Tahun
SASARAN KHUSUS									
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	10	10	20	Hari
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan Strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.	a. Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis daerah, b. Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal perangkat daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya, c. Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi,	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
				I	II	III	IV		
			d. Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.						
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai kualitas data SDI = [(Nilai aspek ketepatan waktu) + (Nilai aspek kelengkapan data) + (Nilai aspek Keunikan isi data) + (Nilai aspek Validitas data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 – 4)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
6	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi 1. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat daftar ruangan dan daftar BMD 2. Bobot 85% PD/UKPD/UPB penyelesaian penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki 3. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM, dan laporan hasil Inventarisasi (LH)	5	25	55	100	100	Persentase
7	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di P2KPTK2	N/A	100	100	100	100	Persentase
8	Terimplementasinya pengembangan	Persentase Implementasi	{(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat)/(Jumlah data yang wajib terkumpul	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
				I	II	III	IV		
	kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam pelajaran pertahun	Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan Desember Triwulan 4)} x 100%						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office, Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office, Jumlah perbal yang terRp.roses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD,	N/A	N/A	50	50	100	Persentase
10	Implementasi Penerapan Manajemen resiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Tersajinya dokumen dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Resiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Resiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal. Triwulan III: 1. Dokumen formulir Penetapan Penanganan Konteks Manajemen Resiko; 2. Dokumen formulir profil dan peta resiko Triwulan IV : Dokumen formulir Penanganan Resiko	N/A	40	80	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
				I	II	III	IV		
			Sumber data : Hasil Verifikasi Inspektorat						
11	Tercapainya target kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Bobot masing-masing variabel Aspek implementasi sebagai berikut : Bp : 9,7% BK : 18,2% Bckk : 43,5 % BE : 28,6 % Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
SASARAN OPERASIONAL									
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jak Survei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Persentase
15	Terselesaikannya tindak lanjut	Persentase progress	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh	25	25	25	25	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
				I	II	III	IV		
	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)						

Selain penetapan Indikator Perkin, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 juga menetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

KSD : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sub KSD : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan disemua Jenjang Satuan Pendidikan

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	
1.	Pengembangan potensi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Menumbuhkan kemandirian dan Kebhinekaan global (mengenal dan menghargai Budaya, mampu berkomunikasi dan bertanggungjawab terhadap kebinekaan) 2. Meningkatnya angka kesiapan masuk sekolah (kondisi thn 2023 = 84% menjadi 85%).	B03	1. Pedoman pelaksanaan pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global dengan melibatkan Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM. 2. Sosialisasi pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global kepada Satuan PAUD di 6 wilayah Kota/Kab dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM). 3. Sosialisasi pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global dari satuan pendidikan kepada masyarakat (orang tua, kader PKK)
			B06	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global. 2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan). 3. Gerakan Pentingnya Layanan PAUD 1 Tahun sebelum SD dengan pelibatan Dasawisma (DPPAPP) dan Majelis Ta'lim (Biro Dikmental dan Kanwil Kemenag)
			B09	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global. 2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan)
			B12	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global.

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	
				2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan). 3. Asesmen dan publikasi keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan Kebhinekaan Global
2.	Peningkatan akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu	Tersedianya laporan evaluasi Implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu: Data yang dievaluasi - Jenis dan jumlah prodi - lulusan yang bekerja - lulusan yang mendapatkan beasiswa pendidikan S 2 dalam dan luar negeri.	B06	1. Integrasi data dengan Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ), Baznas (Bazis) DKI, Kemdikbudristek RI, Kemenag RI, agar tidak terjadi duplikasi. 2. Pemadanan data untuk memastikan ketepatsasaran DTKS dengan data Regsosek dan Bapenda
			B09	1. Tersusunnya laporan evaluasi Implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. 2. Integrasi data dengan YBJ, Baznas DKI, Kemdikbudristek RI, Kemenag RI, agar tidak terjadi duplikasi. 3. Pemadanan data utk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda
			B12	1. Laporan dan Publikasi keberhasilan prestasi penerima KJMU. 2. Program KJMU menjadi eskalator peningkatan kesejahteraan dibuktikan dengan pendapatan alumni yang sudah bekerja. 3. Laporan kegiatan kontribusi penerima bantuan biaya pendidikan (APBD) bagi masyarakat Jakarta
3.	Peningkatan kualitas Pemanfaatan dana KJP Plus	1. Seluruh penerima baru tahap I dan tahap II memperoleh KJP Plus Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 tepat waktu. 2. Pemegang KJP Plus dapat menggunakan Digital Payment melalui aplikasi jakone mobile. 3. tersedianya pendataan penggunaan dana KJP Plus	B03	1. Integrasi data dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan calon penerima KJP Plus warga DKI Jakarta. 2. Pemadanan data untuk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda
			B06	1. Sosialisasi aplikasi JakOne Mobile kepada Pemegang KJP Plus. 2. Terdistribusikannya Dana KJP Plus Tahap I 2024 pada akhir Bulan Juni 2024
			B09	1.Seluruh transaksi Penggunaan dana KJP Plus terpantau. 2. Integrasi data dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan calon penerima KJP Plus warga DKI Jakarta. 3. Pemadanan data untuk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda
			B12	1.Terdistribusikannya Dana KJP Plus Tahap II 2024 pada akhir Bulan Desember 2024. 2. Tersedianya laporan penggunaan dana KJP Plus
4.	Pemenuhan Kewajiban Pengembang diluar Lahan Perencanaan untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	Tersedianya data Pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki kewajiban pada Sektor Pendidikan	B06	Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan inventarisasi data dengan SKPD terkait guna membahas penyediaan data Pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki kewajiban pada Sektor Pendidikan
			B09	Terbitnya usulan Dinas Pendidikan terkait Satuan pendidikan untuk Pemenuhan Kewajiban Pengembang

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	
5.	Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan	Terselesainya rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB	B03	Terlaksananya penghapusan aset satuan pendidikan yang akan direhab total (10 gedung)
			B06	Terbitnya perijinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) satuan pendidikan yang akan di rehab total
			B09	1. Terlaksananya monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah 2. Pelaksanaan progres pekerjaan rehab total di 19 Gedung sekolah dan 1 USB
			B12	1. Terlaksananya monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah 2. Terselesainya 100 % rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB
6.	Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja) dan Perguruan Tinggi. 2. adanya analisis kebutuhan IDUKA. 3. terselenggaranya pameran produk SMK	B03	1. Tersedianya analisis kebutuhan IDUKA dengan kebutuhan kompetensi lulusan SMK 2. Pemetaan perguruan tinggi untuk program fast track 3. Terlaksananya sosialisasi dengan Perguruan Tinggi dan IDUKA 4. Koordinasi terkait perumusan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan
			B06	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 17% dari jumlah seluruh SMK (existing 15%) 2. Tersusunnya program fast track dengan perguruan tinggi kompetensi pariwisata
			B09	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 19% dari jumlah seluruh SMK 2. Tersusunnya program fast track dengan perguruan tinggi kompetensi Bisnis Manajemen
			B12	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 21% dari jumlah seluruh SMK 2. Tersedianya data jumlah perjanjian kerjasama antara SMK dengan IDUKA dan Perguruan Tinggi 3. Penyampaian Informasi Keberhasilan dan Layanan Program Kepada Publik 4. Tersedianya data jumlah keterserapan tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW) 5. Terlaksananya pameran produk SMK 6. Ditandatangani perjanjian kerja sama dengan 20 IDUKA/Perguruan Tinggi
7.	Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di semua jenjang	Meningkatkan jumlah pendidik profesional melalui program peningkatan kompetensi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik	B03	1. Pendataan dan pemetaan pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi calon peserta pelatihan peningkatan kompetensi dan PPG. 2. Tersusunnya instrumen penilaian diri. 3. Melakukan kordinasi dengan Kemendikbudristek RI dan LPTK terkait penambahan kuota peserta PPG
			B06	1. Pelaksanaan Penilaian diri sebelum mengikuti PPG. 2. Pelaksanakan pembekalan calon peserta PPG dengan melibatkan Kemendikbudristek (LPTK) sebagai narasumber
			B09	Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan
			B12	1. Jumlah Peserta PPG yang lulus UKMPPG. 2. Penilaian diri pasca PPG
8.	Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memperoleh kriteria baik dan sedang berdasarkan nilai rapor pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dari 82,86%	B03	1. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan daftar Sekolah Komunitas untuk seluruh satuan pendidikan 2. Pedoman Program Jakarta Sekolah Komunitas 3. Sosialisasi Pedoman Sekolah Komunitas kepada seluruh satuan pendidikan 4. Penyusunan program di masing-masing sekolah komunitas
			B06	Termanfaatkannya Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui program sekolah komunitas 1. SD : dari = 86,9% menjadi 88% satuan pendidikan

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target
		menjadi 85% yang didorong melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)	<p>2. SMP : dari = 73,6% menjadi 80 % satuan pendidikan. 3. SMA : dari = 67,3% menjadi 70% satuan pendidikan 4. SMK : dari = 75% menjadi 77% satuan pendidikan 5. SLB : dari = 85% menjadi 87% satuan pendidikan</p> <p>B09 Terlaksananya program sekolah komunitas dengan kriteria pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Kelas Industri di SMK sebagai berikut : 1. SD : dari = 88% menjadi 90% satuan pendidikan 2. SMP : dari = 73,6% menjadi 85% satuan pendidikan Target 85% didasarkan bahwa sekolah sekolah yang maperoleh kriteria perlu ditingkatkan adalah sekolah swasta dan 29,4% belum IKM dan dimungkinkan dengan ketersediaan sarana prasaran yang belum memadai, tenaga pendidik belum mendapatkan pendampingan yang cukup dalam pemanfaatan PMM 3. SMA : dari = 67,3% menjadi 73% satuan pendidikan 4. SMK : dari = 75% menjadi 79% satuan pendidikan</p> <p>B12 1. Laporan Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas 2. Penyampaian Informasi Keberhasilan dan Layanan Program Kepada Publik Meningkatnya Mutu pendidikan berdasarkan nilai rapor pendidikan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan mencapai kriteria baik dan sedang dari capaian tahun 2023 adalah 82,86% menjadi 83% yang didorong melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

TABEL 3.1. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Utama					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,35	13,51	101,20 %
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,48	11,49	100,09 %

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada tahun 2024 target Harapan Lama Sekolah adalah 13,35 tahun dengan realisasi 13,51 tahun sehingga capaian di tahun 2024 adalah 101,20%. Faktor pendorong keberhasilan capaian yaitu:

- Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU.
- Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
- Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.
- Pemberian bantuan sosial dana pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa.

2. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2024, target Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,48 tahun, dengan realisasi 11,49 tahun, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100,09%. Sama seperti keberhasilan Harapan Lama Sekolah, faktor pendorong keberhasilan capaian Rata-rata Lama Sekolah yaitu :

- a. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
- b. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.679.779.777.502 dan realisasi Rp7.490.107.005.316 atau 77,38% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.889.604.221.926 dan realisasi Rp2.766.818.081.103 atau 71,13%.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp1.895.477.000.006 dan realisasi Rp1.480.108.793.681 atau 78,09%.
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp1.540.808.361.061 dan realisasi Rp1.326.712.776.612 atau 86,10%.
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.687.276.376.732 dan realisasi Rp1.423.114.129.001 atau 84,34%.
 - 5) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp101.074.089.389 dan realisasi Rp74.038.031.338 atau 73,25%.
 - 6) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp278.414.412.079 dan realisasi Rp175.700.265.025 atau 63,11%.
 - 7) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp287.125.316.309 dan realisasi Rp243.614.928.556 atau 84,85%.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp8.101.051.975.865 dan realisasi Rp7.881.934.411.048 atau 97,30% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp7.956.231.882.433 dan realisasi Rp7.758.784.921.459 atau 97,52%,
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp26.505.935.623 dan realisasi Rp25.028.638.181 atau 94,43%,
- 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp42.826.212.884 dan realisasi Rp28.645.929.405 atau 57,55%,
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp4.870.147.572 dan realisasi Rp4.752.196.469 atau 97,58%,
- 5) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp10.330.815.966 dan realisasi Rp10.566.071.127 atau 102,28%,
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp59.548.747.899 dan realisasi Rp57.455.226.907 atau 96,48%,
- 7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp738.233.488 dan realisasi Rp701.427.500 atau 95,01%.

Untuk menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah, Dinas Pendidikan juga melakukan inovasi yaitu Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun.

Keberhasilan pencapaian IKU Dinas Pendidikan, terutama pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi pengeluaran. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta dan capaian Nasional dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

TABEL 3.2. CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2020-2024

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	80,77	81,11	81,65	82,46	84,15
INDONESIA	71,94	72,29	72,91	73,55	75,02

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, BPS

2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

TABEL 3.3. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Selisih
Sasaran Khusus						
1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%	Tercapai
2	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah.	Persen	100	100	100%	Tercapai
3	Nilai kualitas data SDI.	Nilai	3,25	100	100%	Tercapai
4	Persentase pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.	Persen	100	94,89	94,89%	Tidak Tercapai
5	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	117,72	147,15%	Tidak Tercapai
6	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100%	Tidak Tercapai
7	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%	Tercapai
8	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Selisih
9	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	89,96	126,70%	Tercapai
Sasaran Operasional						
10	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
11	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,99	99,99%	Tidak Tercapai
12	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,5	84,32	95,28%	Tidak Tercapai
13	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	Tercapai

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Capaian indikator Jumlah Hari Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV

Target Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV adalah 20 Hari dengan realisasi 20 Hari, sehingga tingkat ketercapaian 100%. Faktor pendorong adalah tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi bersama antara Bidang Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 93,43%.

2. Capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah.

Target indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program

prioritas dan strategis daerah adalah tersusunnya paparan dan terpublikasinya program prioritas dan program umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

3. Nilai kualitas data SDI

Target Nilai kualitas data SDI adalah 3,25 dengan realisasi 3,25, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Nilai kualitas data SDI sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Tahun 2024 adanya UPT Pusdatin Pendidikan yang salah satu tugasnya untuk mengelola data pendidikan.

4. Persentase pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD

Target Persentase Inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD adalah 100% dengan realisasi 94,89%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 94,89%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD tahun 2024 terjadi karena banyak faktor di antaranya jumlah barang di lingkungan Dinas Pendidikan cukup banyak, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus barang dan fasilitas penunjang bagi pengurus barang yang belum lengkap dan memadai, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sekolah, UPT, Dinas Pendidikan, BPAD, dan birokrasi.

5. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Target Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah 80% dengan realisasi 117,72%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 147,15%, hal ini disebabkan karena masih terdapat belanja yang belum dibayar atau masih dalam proses pembayaran yaitu pada belanja barang yang menggunakan dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) pengadaan barang/jasa dan belanja modal di satuan pendidikan sudah diatur dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2022 yaitu dengan sistem daring menggunakan SipLah, sementara SipLah belum terintegrasi dengan bigbox Kemendagri RI.

6. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun

Target Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendukung capaian indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun tahun 2024 yaitu pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan menyadari dan memahami pentingnya pengembangan kompetensi PNS untuk meningkatkan layanan pendidikan.

7. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Target Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan tahun 2024 yaitu adanya SDM yang menangani penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.

8. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Target Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko tahun 2024 yaitu perencanaan dan pelaporan telah didukung oleh sistem informasi sehingga bersifat transparan dan akuntabel, serta penyerapan anggaran setiap program yang di atas 91%. Dinas Pendidikan secara rutin berkoordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Manajemen Resiko sampai Penangan resiko.

9. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- a. Bobot capaian keluaran sub kegiatan (BCKK)
- b. Bobot Efisiensi (BE)
- c. Bobot Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (BK)
- d. Bobot Penyerapan Anggaran (BP)

Pada indikator kinerja di atas Dinas Pendidikan sudah optimal dalam penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994 atau 93,43% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.596.982.727.153 dan realisasi Rp3.188.857.944.965 atau 88,65%.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp2.002.355.624.552 dan realisasi Rp1.932.828.712.824 atau 96,53%.
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp1.618.699.168.375 dan realisasi Rp1.566.749.797.744 atau 96,79%.
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.728.066.056.780 dan realisasi Rp1.670.887.993.956 atau 96,69%.
 - 5) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp80.620.366.516 dan realisasi Rp75.258.163.675 atau 93,35%.
 - 6) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp178.066.052.015 dan realisasi Rp159.831.432.358 atau 89,76%.
 - 7) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp289.751.175.014 dan realisasi Rp276.672.785.472 atau 95,49%.

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp7.467.640.616.638 dan realisasi Rp7.334.062.221.644 atau 98,21% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp7.336.926.257.321 dan realisasi Rp7.217.988.995.702 atau 98,38%,
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp18.471.527.060 dan realisasi Rp17.475.387.638 atau 94,61%,
 - 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp45.541.656.521 dan realisasi Rp34.770.632.255 atau 76,35%,
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp1.963.902.989 dan realisasi Rp1.841.850.356 atau 93,79%,
 - 5) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp4.503.316.353 dan realisasi Rp3.464.673.332 atau 76,94%,
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp59.612.873.919 dan realisasi Rp57.901.599.886 atau 97,13%,
 - 7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp621.082.475 dan realisasi Rp619.082.475 atau 99,68%.

10. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Target indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur yaitu terselesaikannya seluruh Tindak Lanjut Arahan Gubernur bagi Dinas Pendidikan.

11. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Target indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100% dengan realisasi 99,99%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 99,99%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu terselesaikan dengan tuntas seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan hanya faktor waktu penyelesaian pengaduan belum sesuai aturan kedepannya Dinas Pendidikan akan segera merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

12. Capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Target indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah 88,5% dengan realisasi 84,32%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 95,28%. Faktor penghambat capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah jumlah responden yang cukup banyak dan tidak semua masyarakat merasa puas atas kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan, meskipun demikian Dinas Pendidikan akan terus meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terus meningkat.

13. Capaian indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Target indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2024 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu semakin banyaknya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sesuai target.

TABEL 3.4. REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN 2024

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	Capaian	
1.	Pengembangan potensi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Menumbuhkan kemandirian dan Kebhinekaan global (mengetahui dan menghargai Budaya, mampu berkomunikasi dan bertanggungjawab terhadap kebhinekaan) 2. Meningkatkan angka kesiapan masuk sekolah (kondisi thn 2023 = 84% menjadi 85%).	B03	1. Pedoman pelaksanaan pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global dengan melibatkan Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM. 2. Sosialisasi pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global kepada Satuan PAUD di 6 wilayah Kota/Kab dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM). 3. Sosialisasi pendidikan karakter kemandirian dan kebhinekaan global dari satuan pendidikan kepada masyarakat (orang tua, kader PKK)	100%
			B06	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global. 2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan). 3. Gerakan Pentingnya Layanan PAUD 1 Tahun sebelum SD dengan pelibatan Dasawisma (DPPAPP) dan Majelis Ta'lim (Biro Dikmental dan Kanwil Kemenag)	100%
			B09	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global. 2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan)	100%
			B12	1. Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan kebhinekaan global. 2. Pelaksanaan kunjungan guru tamu dari SKPD terkait (Disbud, Dinkes, Dispusip, dan DPPKUKM) tentang kemandirian dan kebhinekaan global (10 satuan pendidikan per wilayah utk di Kab. pulau seribu 6 satuan pendidikan). 3. Asesmen dan publikasi keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan (SPAUD) terkait kemandirian dan Kebhinekaan Global	100%
2.	Peningkatan akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu	Tersedianya laporan evaluasi Implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu: Data yang dievaluasi - Jenis dan jumlah	B06	1. Integrasi data dengan Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ), Baznas (Bazis) DKI, Kemdikbudristek RI, Kemenag RI, agar tidak terjadi duplikasi. 2. Pemadanan data untuk memastikan ketepatan sasaran DTKS dengan data Regsosek dan Bapenda	100%
			B09	1. Tersusunnya laporan evaluasi Implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. 2. Integrasi data dengan YBJ, Baznas DKI, Kemdikbudristek RI, Kemenag RI, agar tidak terjadi duplikasi.	100%

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	Capaian
		prodi - lulusan yang bekerja - lulusan yang mendapatkan beasiswa pendidikan S 2 dalam dan luar negeri.	B12 3. Pemadanan data utk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda 1. Laporan dan Publikasi keberhasilan prestasi penerima KJMU. 2. Program KJMU menjadi eskalator peningkatkan kesejahteraan dibuktikan dengan pendapatan alumni yang sudah bekerja. 3. Laporan kegiatan kontribusi penerima bantuan biaya pendidikan (APBD) bagi masyarakat Jakarta	100%
3.	Peningkatan kualitas Pemanfaatan dana KJP Plus	1. Seluruh penerima baru tahap I dan tahap II memperoleh KJP Plus Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 tepat waktu. 2. Pemegang KJP Plus dapat menggunakan Digital Payment melalui aplikasi jakone mobile. 3. tersedianya pendataan penggunaan dana KJP Plus	B03 1. Integrasi data dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan calon penerima KJP Plus warga DKI Jakarta. 2. Pemadanan data untuk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda	100%
			B06 1. Sosialisasi aplikasi JakOne Mobile kepada Pemegang KJP Plus. 2. Terdistribusikannya Dana KJP Plus Tahap I 2024 pada akhir Bulan Juni 2024	100%
			B09 1.Seluruh transaksi Penggunaan dana KJP Plus terpantau. 2. Integrasi data dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan calon penerima KJP Plus warga DKI Jakarta. 3. Pemadanan data untuk ketepatsasaran DTKS dgn data Regsosek dan Bapenda	100%
			B12 1.Terdistribusikannya Dana KJP Plus Tahap II 2024 pada akhir Bulan Desember 2024. 2. Tersedianya laporan penggunaan dana KJP Plus	100%
4.	Pemenuhan Kewajiban Pengembang diluar Lahan Perencanaan untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	Tersedianya data Pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki kewajiban pada Sektor Pendidikan	B06 Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan inventarisasi data dengan SKPD terkait guna membahas penyediaan data Pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki kewajiban pada Sektor Pendidikan	100%
			B09 Terbitnya usulan Dinas Pendidikan terkait Satuan pendidikan untuk Pemenuhan Kewajiban Pengembang	100%
5.	Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan	Terselesaikannya rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB	B03 Terlaksanya penghapusan aset satuan pendidikan yang akan direhab total (10 gedung)	100%
			B06 Terbitnya perijinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) satuan pendidikan yang akan di rehab total	100%
			B09 1. Terlaksananya monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah 2. Pelaksanaan progres pekerjaan rehab total di 19 Gedung sekolah dan 1 USB	100%
			B12 1. Terlaksananya monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah 2. Terselesaikannya 100 % rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB	100%

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target		Capaian
6.	Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja) dan Perguruan Tinggi. 2. Adanya analisis kebutuhan IDUKA. 3. Terselenggaranya pameran produk SMK	B03	1. Tersedianya analisis kebutuhan IDUKA dengan kebutuhan kompetensi lulusan SMK 2. Pemetaan perguruan tinggi untuk program fast track 3. Terlaksananya sosialisasi dengan Perguruan Tinggi dan IDUKA 4. Koordinasi terkait perumusan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan	100%
			B06	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 17% dari jumlah seluruh SMK (existing 15%) 2. Tersusunnya program fast track dengan perguruan tinggi kompetensi pariwisata	100%
			B09	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 19% dari jumlah seluruh SMK 2. Tersusunnya program fast track dengan perguruan tinggi kompetensi Bisnis Manajemen	100%
			B12	1. Terbentuknya kelas industri sebanyak 21% dari jumlah seluruh SMK 2. Tersedianya data jumlah perjanjian kerjasama antara SMK dengan IDUKA dan Perguruan Tinggi 3. Penyampaian Informasi Keberhasilan dan Layanan Program Kepada Publik 4. Tersedianya data jumlah keterserapan tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW) 5. Terlaksananya pameran produk SMK 6. Ditandatanganinya perjanjian kerja sama dengan 20 IDUKA/Perguruan Tinggi	100%
7.	Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di semua jenjang	Meningkatkan jumlah pendidik profesional melalui program peningkatan kompetensi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik	B03	1. Pendataan dan pemetaan pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi calon peserta pelatihan peningkatan kompetensi dan PPG. 2. Tersusunnya instrumen penilaian diri. 3. Melakukan kordinasi dengan Kemendikbudristek RI dan LPTK terkait penambahan kuota peserta PPG	100%
			B06	1. Pelaksanaan Penilaian diri sebelum mengikuti PPG. 2. Pelaksanaan pembekalan calon peserta PPG dengan melibatkan Kemendikbudristek (LPTK) sebagai narasumber	100%
			B09	Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan	100%
			B12	1. Jumlah Peserta PPG yang lulus UKMPPG. 2. Penilaian diri pasca PPG	100%
8.	Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memperoleh kriteria baik dan sedang berdasarkan nilai rapor pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dari 82,86% menjadi 85% yang	B03	1. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan daftar Sekolah Komunitas untuk seluruh satuan pendidikan 2. Pedoman Program Jakarta Sekolah Komunitas 3. Sosialisasi Pedoman Sekolah Komunitas kepada seluruh satuan pendidikan 4. Penyusunan program di masing-masing sekolah komunitas	100%
			B06	Termanfaatkannya Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui program sekolah komunitas 1. SD : dari = 86,9% menjadi 88% satuan pendidikan 2. SMP : dari = 73,6% menjadi 80 % satuan pendidikan. 3. SMA : dari = 67,3% menjadi 70% satuan pendidikan	100%

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Target	Capaian
		didorong melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)	<p>4. SMK : dari = 75% menjadi 77% satuan pendidikan</p> <p>5. SLB : dari = 85% menjadi 87% satuan pendidikan</p>	
			<p>B09 Terlaksananya program sekolah komunitas dengan kriteria pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Kelas Industri di SMK sebagai berikut :</p> <p>1. SD : dari = 88% menjadi 90% satuan pendidikan</p> <p>2. SMP : dari = 73,6% menjadi 85% satuan pendidikan Target 85% didasarkan bahwa sekolah sekolah yang maperoleh kriteria perlu ditingkatkan adalah sekolah swasta dan 29,4% belum IKM dan dimungkinkan dengan ketersediaan sarana prasaran yang belum memadai, tenaga pendidik belum mendapatkan pendampingan yang cukup dalam pemanfaatan PMM</p> <p>3. SMA : dari = 67,3% menjadi 73% satuan pendidikan</p> <p>4. SMK : dari = 75% menjadi 79% satuan pendidikan</p>	100%
			<p>B12 1. Laporan Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas</p> <p>2. Penyampaian Informasi Keberhasilan dan Layanan Program Kepada Publik Meningkatnya Mutu pendidikan berdasarkan nilai rapor pendidikan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan mencapai kriteria baik dan sedang dari capaian tahun 2023 adalah 82,86% menjadi 83% yang didorong melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p>	100%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini berfokus pada peningkatan karakter kemandirian dan kebhinekaan global serta kesiapan anak untuk masuk sekolah. Capaian utama adalah:

- Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan potensi peserta didik.
- Sosialisasi pendidikan karakter kepada satuan PAUD di 6 wilayah serta masyarakat.
- Pelaksanaan kunjungan guru tamu dan gerakan layanan PAUD dengan melibatkan berbagai SKPD.

Capaian seluruh kegiatan mencapai **100%** sesuai target pada setiap tahapan (B03, B06, B09, dan B12).

2. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Program ini memastikan implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berjalan efektif melalui integrasi dan pepadanan data dengan berbagai instansi. Hasil capaian:

- Laporan evaluasi dan publikasi keberhasilan penerima KJMU yang menunjukkan program ini meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan.

Semua kegiatan juga mencapai **100%**, mencakup integrasi data, evaluasi, dan publikasi hasil pada setiap tahapan.

3. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana KJP Plus

Program ini bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana KJP Plus tahap I dan II, pemanfaatan pembayaran digital, serta pelaporan penggunaan dana. Realisasi:

- Integrasi data penerima KJP dengan Dinas Dukcapil dan Bapenda.
- Sosialisasi aplikasi digital dan pemantauan transaksi penggunaan dana.

Semua target terlaksana dengan capaian **100%** di setiap tahapan.

4. Pemenuhan Kewajiban Pengembang untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan

Fokus pada penyediaan data pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki kewajiban pendidikan.

- Laporan hasil koordinasi dan inventarisasi data.
- Terbitnya usulan satuan pendidikan untuk pemenuhan kewajiban.

Capaian mencapai 100% untuk semua tahapan.

5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Program ini berhasil menyelesaikan rehabilitasi total 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 unit sekolah baru (USB). Capaian meliputi:

- Penghapusan aset sekolah yang direhab.
- Perizinan bangunan, monitoring, dan penyelesaian pekerjaan rehabilitasi.

Semua target tercapai 100% pada tiap tahapan.

6. Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK (BMW: Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha)

Program ini mendukung keterhubungan SMK dengan dunia industri, usaha, dan kerja (IDUKA) melalui:

- Analisis kebutuhan IDUKA, sosialisasi, dan program fast track dengan perguruan tinggi.
- Terbentuknya kelas industri sebanyak 21% dari total SMK.
- Terselenggaranya pameran produk SMK dan penandatanganan kerja sama dengan 20 IDUKA/perguruan tinggi.

Capaian keseluruhan mencapai 100%.

7. Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di Semua Jenjang

Program ini mendukung pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan peningkatan kompetensi pendidik yang belum bersertifikat. Kegiatan mencakup:

- Pendataan, pembekalan, hingga pelaksanaan PPG.
- Penilaian diri peserta PPG sebelum dan sesudah program.

Semua target tercapai 100% pada semua tahap.

8. Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas

Program ini meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Capaian:

- Peningkatan jumlah sekolah komunitas dengan kriteria baik dan sedang.
- Tersedianya pedoman program dan penyampaian informasi keberhasilan kepada publik.

- Capaian mencapai 100% pada setiap tahap pelaksanaan.

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5. Indikator Program Kerja Dalam Renstra Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase (%)	100	72,5
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase (%)	100	66,87
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase (%)	30	83,07
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase (%)	100	72,37
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase (%)	100	98,83
		Persentase guru profesional	Persentase (%)	87,40	87,49
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase (%)	72,37	82,84
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	68,75	81,95
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	61,33	65,24
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase (%)	100	53,69
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Index	4	4

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun dipertjanjikan 2020 – 2024 dan Renstra tahun 2023-2026 pada tabel berikut:

TABEL 3.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No	Sasaran	IKU	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,40	80,77								
2		Harapan Lama Sekolah	Nilai			13	13,07	13,07	13,08	13,09	13,33	13,35	13,51
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Indeks	3,200	3,171								
4	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Persentase	11,55	11,17	11,19	11,20	11,20	11,31	11,33	11,45	11,48	11,49
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100	91	91,5	91	91,02				

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan mengampu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Skor EKPPD, Rata-rata Lama Sekolah dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran sesuai tujuan SKPD pada Renstra Tahun 2023-2026. Pada realisasi indikator IPM tahun 2020 dan tahun sebelumnya terus meningkat tiap tahunnya dan selalu mencapai target dari yang telah ditetapkan. Begitupun dengan indikator skor EKPPD, capaian tahun 2020 masih menggunakan angka realisasi tahun 2018 karena angka capaian belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri, untuk Rata-rata lama sekolah dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran juga selalu mencapai target.

Akan tetapi pada tahun 2021, berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan yang juga sesuai dengan arahan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan tidak lagi mengampu Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan pada indikator tersebut terdiri lebih dari satu komponen pembentuk, sehingga tidak saja diampu oleh Dinas Pendidikan tetapi juga SKPD lain. Oleh sebab itu pada tahun 2021 Dinas Pendidikan mengampu indikator tujuan SKPD yaitu Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 13,08 tahun dari target tahun 2022 yaitu 13,07 tahun, sedangkan pada indikator tujuan skor EKPPD juga tidak digunakan lagi.

Pada Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah, realisasi tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun bila dibandingkan dengan target tahunan 2020 realisasi berada dibawah target, serta pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi RLS melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu juga pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi tahun 2020 hingga 2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

TABEL 3.7. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi Tahun 2023	Target			Kondisi Akhir 2026
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persen tase	80,97	72,50	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen tase	38,65	66,87	100	100	100	100
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen tase	22,54	83,07	35	45	55	55
4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen tase	36,38	72,37	100	100	100	100
5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen tase	99,1	98,83	100	100	100	100
6	Persentase guru profesional	Persen tase	86,3	87,49	88,5	89,6	90,7	90,7
7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persen tase	72,18	82,84	72,56	72,75	72,94	72,94
8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen tase	67,58	81,95	69,92	71,08	72,25	72,25
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen tase	60,17	65,24	62,50	63,67	64,83	64,83
10	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen tase			100			

- a. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 72,50 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,50 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat anak usia 16 tahun yang masih bersekolah di menengah pertama dan usia 18 tahun yang sudah lulus menengah atas.
- b. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 66,87 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 33,13 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar.

- c. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 30 serta capaiannya 83,07 (tercapai).
 - d. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 72,37 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,63 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas dan kesadaran orang tua, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 6 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SD.
 - e. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 98,83 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 1,17 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.
 - f. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 87,40 serta capaiannya 87,49 (tercapai).
 - g. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,37 serta capaiannya 82,84 (tercapai).
 - h. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 68,75 serta capaiannya 81,95 (tercapai).
 - i. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 61,33 serta capaiannya 65,24 (tercapai).
 - j. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS).
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta juga dapat diperbandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lain dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2023, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 13,33 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 13,15 tahun, Ini berarti Harapan Lama Sekolah penduduk Jakarta mengenyam pendidikan formal adalah 13,33 tahun atau setara Diploma 1, sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk secara nasional untuk mengenyam

pendidikan adalah 13,15 tahun atau juga setara dengan Diploma 1. Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta meningkat 0,25% dari capaian tahun 2022 yang sebesar 13,08 tahun, Faktor pendorong pencapaian indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU, tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan, perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.8. PERBANDINGAN CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	13,08	13,33	13,51
INDONESIA	13,10	13,15	13,21

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2024, BPS

- b. Pada Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 11,45 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 8,77 tahun. Ini berarti penduduk Jakarta rata-rata telah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 11 jenjang Sekolah Menengah, serta mendekati target Pemerintah terkait Wajib Belajar 12 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional adalah 8,77 tahun atau rata-rata penduduk secara nasional baru menamatkan pendidikan formal hingga kelas 8 jenjang Sekolah Menengah. Jelas bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta berada diatas capaian nasional, sekaligus menjadi provinsi dengan peringkat pertama yang capaiannya tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hasil capaian Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.9. PERBANDINGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	11,31	11,45	11,49
INDONESIA	8,69	8,77	8,85

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023, BPS

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 9 (sembilan) Indikator Program sebagai berikut:

- a. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 30 serta capaiannya 83,07 (tercapai).
- b. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 72,37 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,63 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas dan kesadaran orang tua, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 6 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SD.
- c. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 98,83 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 1,17 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.
- d. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 87,40 serta capaiannya 87,49 (tercapai).
- e. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,37 serta capaiannya 82,84 (tercapai).
- f. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 68,75 serta capaiannya 81,95 (tercapai).
- g. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 61,33 serta capaiannya 65,24 (tercapai).
- h. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 72,50 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,50 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat anak usia 16 tahun yang masih bersekolah di menengah pertama dan usia 18 tahun yang sudah lulus menengah atas.
- i. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 66,87 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 33,13 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

TABEL 3.10. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,51	101,20%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.101.051.975.865	7.878.055.605.789	97,25
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	100,09%	Program Pengelolaan Pendidikan	9.679.779.777.502	8.851.223.167	91,44
							Jumlah	17.780.831.753.367	16.729.279.431.956	94,09%

Sasaran strategis Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas Bagi Semua dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target di tahun 2024 sebesar 13,35 dengan realisasi 13,51 atau 101,20% (tercapai). Adapun sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Di segala Jenjang Satuan Pendidikan secara Tuntas dan Berkelanjutan dengan indikator sasaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki target di tahun 2024 sebesar 11,48 dengan realisasi 11,49 atau 100,09% (tercapai).

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

TABEL 3.11. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2024

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.679.779.777.502	8.851.223.167	91,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.101.051.975.865	7.878.055.605.789	97,25
Jumlah	17.780.831.753.367	16.729.279.431.956	94,09%

3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

TABEL 3.12. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2024

NO	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	DINAS PENDIDIKAN	10.765.919.648.450	10.411.304.000.871	96,71%
2	SUDINDIK KAB - KEP. SERIBU	43.095.637.425	42.335.838.554	98,24%
3	SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKBAR	256.792.035.327	244.555.449.929	95,23%
4	SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKPUS	133.744.051.052	130.026.270.647	97,22%
5	SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKSEL	274.851.716.442	267.380.229.525	97,28%
6	SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKTIM	443.417.915.432	430.221.833.738	97,02%
7	SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKUT	153.225.554.966	148.462.802.397	96,89%
8	SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKBAR	226.700.370.377	213.042.079.397	93,98%
9	SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKPUS	176.927.404.750	166.562.202.535	94,14%
10	SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKSEL	279.511.619.072	266.822.229.418	95,46%
11	SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKTIM	385.385.336.402	376.413.786.668	97,67%
12	SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKUT	199.901.827.527	194.103.348.838	97,10%
13	PUSDATINDIK	9.985.673.893	9.566.199.381	95,80%
14	P4 - JAKBAR	17.431.955.601	16.568.908.150	95,05%
15	P4 - JAKPUS	15.541.721.280	15.508.910.659	99,79%
16	P4 - JAKSEL	13.256.905.211	13.037.208.089	98,34%
17	P4 - JAKTIM	17.074.618.334	16.926.079.093	99,13%
18	P4 - JAKUT & KEP.SERIBU	10.711.836.225	10.567.338.506	98,65%
19	P4OP	2.854.427.740.671	2.828.571.989.359	99,09%
20	UP PRASARDIK	1.438.155.193.119	868.984.750.031	60,42%
21	SMANU MH THAMRIN	8.713.027.674	7.966.315.073	91,43%
22	SMKN 13 JAKARTA	3.214.207.953	3.217.416.504	100,10%
23	SMKN 20 JAKARTA	3.752.694.256	3.140.492.112	83,69%
24	SMKN 24 JAKARTA	4.427.264.191	4.395.795.531	99,29%
25	SMKN 26 JAKARTA	8.658.890.018	6.492.733.809	74,98%
26	SMKN 27 JAKARTA	7.233.378.166	7.068.316.725	97,72%
27	SMKN 32 JAKARTA	4.012.240.048	3.671.720.955	91,51%
28	SMKN 33 JAKARTA	2.982.672.309	2.653.669.567	88,97%
29	SMKN 36 JAKARTA	5.339.648.483	4.422.502.360	82,82%
30	SMKN 37 JAKARTA	3.394.143.590	3.229.185.556	95,14%
31	SMKN 51 JAKARTA	3.216.638.432	3.120.237.562	97,00%
32	SMKN 57 JAKARTA	7.125.555.254	6.457.134.928	90,62%
33	SMKN 63 JAKARTA	2.702.631.437	2.482.455.489	91,85%
	Grand Total	17.780.831.753.367	16.729.279.431.956	94,09%

Dari hasil capaian tahun 2024, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan budaya kerja di Dinas Pendidikan yang dibuktikan dengan integritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan. Integritas keselarasan antara target dengan realisasi seperti tercapainya target Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dapat dirasakan bagi seluruh warga Jakarta. Membangun kerjasama dan kemitraan yang efektif, baik antar SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat (BPMP Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta) dan dengan stakeholder pendidikan seperti Perguruan Tinggi, asosiasi profesi guru, Lembaga Pemerhati Pendidikan. Pekerjaan yang dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dilaporkan setiap triwulan pada sistem e-monev dan adanya Telaah DPA dan pemantauan penyerapan anggaran yang membuat penyerapan anggaran tahun 2024 lebih optimal. Munculnya gagasan pembaharuan untuk meningkatkan mutu layanan seperti inovasi sistem pelatihan Jaklat, pelaksanaan PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta dan pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan berkeadilan untuk memastikan pendidikan dapat dirasakan secara merata bagi warga Jakarta melalui adanya jalur afirmasi yang dikhususkan bagi peserta didik dengan ekonomi menengah kebawah yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan sudah menyajikan seluruh target indikator dan capaian kinerja, dan sudah di selaraskan antara dokumen renstra dan perjanjian kinerja;
2. Dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dinas Pendidikan telah mencapai target masing-masing sebesar 13,51 dari target 13,35 atau 101,20% dan sebesar 11,49 dari target 11,48 atau 100,09%.
3. Dari 15 Indikator Kinerja, ada 3 indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yaitu :
 - a. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD;
 - b. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp16.729.279.431.956,00 dari anggaran Rp17.780.831.753.367,00 atau 94,09%.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Perlu perencanaan yang lebih baik lagi sehingga penyerapan anggaran secara optimal dan kualitas dapat tercapai;
2. Memaksimalkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan membuat alternatif pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih efektivitas dan efisiensi berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai akan dibuat rencana aksi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan tersebut.

C. Rencana Tindak Lanjut

Demi menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan yang lebih baik sehingga penyerapan dapat dioptimalkan dan berkualitas;
2. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan melakukan evaluasi alternatif pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana aksi dan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang belum mencapai target.

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sarjoko
NIP 196703191998031006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paruwokalo
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

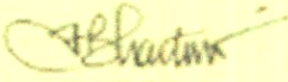

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Plt. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 31 Januari 2024


Pihak Kedua Plt. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Pihak Kesatu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Heru Budi Hartono	 Paruwokalo NIP. 196707241997001006

Materi	Sumber	Indikator Kinerja	Sasaran	Program/Kegiatan	Tahun	Tahun	Kategori
Komunikasi	<p>1. Laporan Tahunan</p> <p>2. Laporan Keuangan</p> <p>3. Laporan Pertanggungjawaban</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Penyusunan Laporan Tahunan</p> <p>2. Penyusunan Laporan Keuangan</p> <p>3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban</p>	2024	2024	Keuangan
Kelembagaan	<p>1. Peraturan Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri</p> <p>3. Peraturan Kepala</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>2. Penyusunan Peraturan Menteri</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Kepala</p>	2024	2024	Kelembagaan
Kelembagaan	<p>1. Peraturan Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri</p> <p>3. Peraturan Kepala</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Tersedia dan dapat diakses</p> <p>2. Lengkap dan akurat</p> <p>3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>2. Penyusunan Peraturan Menteri</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Kepala</p>	2024	2024	Kelembagaan

No. Urut	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pegawai yang Ditugaskan	Tahun	Kategori
				<p>1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan.</p> <p>3. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pembinaan dan pengawasan.</p> <p>4. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai.</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi pegawai dalam kegiatan organisasi.</p> <p>7. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar pegawai.</p> <p>8. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi.</p> <p>10. Meningkatkan kemampuan berkolaborasi.</p>		
<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>2. Meningkatkan kepuasan masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan aksesibilitas layanan.</p> <p>4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi.</p> <p>6. Meningkatkan inovasi dan kreativitas.</p> <p>7. Meningkatkan kerjasama dengan mitra.</p> <p>8. Meningkatkan keberlanjutan.</p> <p>9. Meningkatkan daya saing.</p> <p>10. Meningkatkan daya tarik.</p>	<p>1. Jumlah keluhan masyarakat.</p> <p>2. Jumlah pengaduan masyarakat.</p> <p>3. Jumlah pengaduan yang ditanggapi.</p> <p>4. Jumlah pengaduan yang selesai.</p> <p>5. Jumlah pengaduan yang ditolak.</p> <p>6. Jumlah pengaduan yang ditunda.</p> <p>7. Jumlah pengaduan yang diteliti.</p> <p>8. Jumlah pengaduan yang diproses.</p> <p>9. Jumlah pengaduan yang diselesaikan.</p> <p>10. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.</p>	<p>1. Laporan masyarakat.</p> <p>2. Laporan pengaduan masyarakat.</p> <p>3. Laporan pengaduan yang ditanggapi.</p> <p>4. Laporan pengaduan yang selesai.</p> <p>5. Laporan pengaduan yang ditolak.</p> <p>6. Laporan pengaduan yang ditunda.</p> <p>7. Laporan pengaduan yang diteliti.</p> <p>8. Laporan pengaduan yang diproses.</p> <p>9. Laporan pengaduan yang diselesaikan.</p> <p>10. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti.</p>	<p>1. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat.</p> <p>2. Kepala Subbidang Pelayanan Masyarakat.</p> <p>3. Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat.</p> <p>4. Kepala Subseksi Pelayanan Masyarakat.</p> <p>5. Kepala Unit Pelayanan Masyarakat.</p> <p>6. Kepala Tim Pelayanan Masyarakat.</p> <p>7. Kepala Staf Pelayanan Masyarakat.</p> <p>8. Kepala Relawan Pelayanan Masyarakat.</p> <p>9. Kepala Mitra Pelayanan Masyarakat.</p> <p>10. Kepala Mitra Kerja Pelayanan Masyarakat.</p>			
<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan.</p> <p>3. Meningkatkan kinerja dan disiplin.</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan organisasi.</p> <p>6. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama.</p> <p>7. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi.</p> <p>8. Meningkatkan kemampuan berkolaborasi.</p> <p>9. Meningkatkan daya saing dan daya tarik.</p> <p>10. Meningkatkan keberlanjutan.</p>	<p>1. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan.</p> <p>2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan.</p> <p>3. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan pengawasan.</p> <p>4. Jumlah pegawai yang mengikuti disiplin dan tanggung jawab.</p> <p>5. Jumlah pegawai yang mengikuti kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>6. Jumlah pegawai yang mengikuti partisipasi dalam kegiatan organisasi.</p> <p>7. Jumlah pegawai yang mengikuti komunikasi dan kerjasama.</p> <p>8. Jumlah pegawai yang mengikuti kemampuan beradaptasi dan berinovasi.</p> <p>9. Jumlah pegawai yang mengikuti kemampuan berkolaborasi.</p> <p>10. Jumlah pegawai yang mengikuti daya saing dan daya tarik.</p>	<p>1. Laporan pegawai.</p> <p>2. Laporan pelatihan dan pengembangan.</p> <p>3. Laporan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>4. Laporan disiplin dan tanggung jawab.</p> <p>5. Laporan kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>6. Laporan partisipasi dalam kegiatan organisasi.</p> <p>7. Laporan komunikasi dan kerjasama.</p> <p>8. Laporan kemampuan beradaptasi dan berinovasi.</p> <p>9. Laporan kemampuan berkolaborasi.</p> <p>10. Laporan daya saing dan daya tarik.</p>	<p>1. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia.</p> <p>2. Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia.</p> <p>3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia.</p> <p>4. Kepala Subseksi Sumber Daya Manusia.</p> <p>5. Kepala Unit Sumber Daya Manusia.</p> <p>6. Kepala Tim Sumber Daya Manusia.</p> <p>7. Kepala Staf Sumber Daya Manusia.</p> <p>8. Kepala Relawan Sumber Daya Manusia.</p> <p>9. Kepala Mitra Sumber Daya Manusia.</p> <p>10. Kepala Mitra Kerja Sumber Daya Manusia.</p>			

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Utama	Indikator Kinerja	Tipe	Status	Kategori
11	Tumbuhnya jumlah guru profesional yang lulus sertifikasi pendanaan 2024	Tumbuhnya jumlah guru profesional yang lulus sertifikasi pendanaan 2024	Peningkatan	Tumbuhnya jumlah guru profesional yang lulus sertifikasi pendanaan 2024	Kuantitatif	100%	Peningkatan

Kepala Dinas Pendidikan

 Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan

 Kepala Dinas Pendidikan

50

Siswa

Indukur Karna Utama

Tanggal 10/11/2024

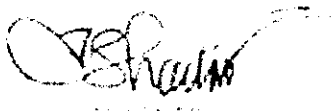
Kendala atau hambatan Rancangan Kegiatan yang ditugaskan oleh guru

Adanya Keterbatasan

Tempat

Waktu

1. Keterbatasan tempat untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas.	1. Keterbatasan waktu untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas.	
2. Keterbatasan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran.	2. Keterbatasan tenaga pendidik yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran.	
3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran.	
4. Keterbatasan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	4. Keterbatasan koordinasi dan komunikasi antara guru dan siswa.	
5. Keterbatasan kemampuan komunikasi dan interpersonal siswa.	5. Keterbatasan dukungan dan partisipasi orang tua dalam kegiatan pembelajaran.	
6. Keterbatasan kemampuan literasi dan numerasi siswa.	6. Keterbatasan akses dan kualitas layanan internet.	
7. Keterbatasan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.	7. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	
8. Keterbatasan kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama siswa.	8. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	
9. Keterbatasan kemampuan beradaptasi dan berinovasi siswa.	9. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	
10. Keterbatasan kemampuan berprestasi siswa.	10. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	




PRESTASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024
PRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR



Juara 1 Renang Putri, 100 meter Gaya Bebas dalam O2SN



Juara 1 Senam Putri (Meja Lompat) dalam O2SN



Medali Emas Bidang Matematika dalam OSN



Medali Emas Bidang IPA dalam OSN

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Juara 1 Kata Perorangan Putri Karate dalam O2SN



Medali Emas Bidang IPA dalam OSN



Medali Emas Bidang IPA dalam OSN



Juara 1 Solo Creative Putri – Pencak Silat dalam O2SN

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS



Medali Emas Cabang Desain Poster dalam FLS2N



Medali Emas Cabang Aplikasi, Video, dan Animasi Digital dalam FIKSI



Medali Emas Cabang Atletik Putri dalam O2SN



Juara III Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora dalam OPSI

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Medali Emas 50 Meter Gaya Dada - Renang Putra dalam O2SN SMK Tingkat Nasional



Medali Emas Jurus Tunggal - Pencak Silat Putri dalam O2SN SMK Tingkat Nasional



Medali Emas Bidang Lomba Kabel Jaringan Komputer Informasi (Information Network Cabling) dalam LKS SMK



Medali Perak Bidang Lomba Film Pendek dalam FLS2N